PERAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PULAU PULAU BATU KABUPATEN NIAS SELATAN

SKRIPSI

OLEH :

RIKA ELSIA GAURIFA
188510062

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

PERAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PULAU-PULAU BATU KABUPATEN NIAS SELATAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

OLEH :

RIKA ELSIA GAURIFA
188510062

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi	:	Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.
Nama Mahasiswa	:	Rika Elsia Gaurifa
NPM	:	188510062
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Adam, M.AP	**Marlina Deliana S.AB., M.AB**

Mengetahui :

Dekan	Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M,Si	**Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si**

Tanggal lulus : 18 Agustus 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/9/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini berdasarkan dari hasil penyusunan saya sendiri sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UniversitasMedan Area, skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu didalam penulisan skripsi ini yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma,kaidah, dan etika dalam penulisan karyailmiah.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku,apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Agustus 2022

Rika Elsia Gaurifa

188510062

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rika Elsia Gaurifa
Npm	: 188510062
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya	: Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Camat Dalam Mewujudkan Good governance di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data(database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 14 September 2022
Yang Menyatakan

Rika Elsia Gaurifa
18851006

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rika Elsia Gaurifa, anak dari Bapak Suhardin Gaurifa dan Ibu Itaria Duha. Lahir di desa Hiliotalua pada tanggal 09 Juli 2000 Di Kecamatan Pulau- Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri No 071123 Pulau Tello, Kabupaten Nias Selatan dan lulus pada tanggal 16 juni 2012, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMP Swasta Kristen BNKP Pulau Tello dan lulus pada tanggal 10 Juni 2015, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Batu dan lulus pada tanggal 03 mei 2018. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah pada tahun 2018 Sampai sekarang terdaftarmenjadi mahasiswa di Universitas Medan Area, penulis terdaftar sebagai mahasiswa programstudi ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan pada tgl 27 Agustus 2021 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun. Penulis melakukan penelitian di Kantor Camat Pulau-Pulau Batu.

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

ABSTRAK

PERAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PULAU-PULAU BATU KABUPATEN NIAS SELATAN

Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan yang belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama mengenai transparan kepada masyarakat belum ada keterbukaan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran camat serta kendala dalam mewujudkan good governance di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Camat, Pegawai, dan Masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Data di kumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan pengaduan masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu bahwa tidak adanya Transparan pemerintah kepada masyarakat di kecamatan pulau-pulau batu Maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat dalam mewujudkan Good Governance di Kecamatan Pulau-Pulau batu Kabupaten Nias Selatan masih belum berjalan dengan efektif. Dalam hal transparan. Hal ini dilihat dari tiga indikator yang digunakan antara lain kebijakan, strategi, komunikasi. Kendala Camat dalam mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan ialah kurangnya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana juga kurang memadai.

Kata Kunci : Peran, Camat, Good Governance

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

ABSTRACT

THE ROLE OF THE SUB-DISTRICT HEAD IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN THE SOUTHERN NIAS DISTRICT

The background of the problem in this thesis is the role of the sub-district head in realizing good governance in the sub-district of pulau batu, south Nias Regency, which has not been fully effective. Especially regarding transparency to the public there is no openness. This study aims to determine the role of the sub-district head and the obstacle in realizing good governance in the pulau batu sub-district, south Nias Regency. this study uses qualitative methods as data analysis. The sources of data in this study were the sub-district head,employees, and the community in the pulau batu sub-district. Data were collection techniques, namely : observation,interviews,and documentation. With public complaints in the pulau batu sub-district that there is no transparent government to the people in the pulau pulau batu sub-district, the results of the study indicate that the role of the camat in realizinggood governance in the pulau batu sub-district, south Nias Regency, is still not running effectively in terms of transparency. This can be seen from the three indicators used, including policy,strategy, and communication. The sub-district, south Nias Regency, is the lack of human resources and inadequate facilities and infrastructure.

Keywords : role, sub-district head, good governance

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Serta penulis megucap syukur telah di berikan pengetahuan, kesehatan,pengalaman, dan kesempatan untukdapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Proposal skripsi ini berjudul **"Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan"** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan yang harus di selesaikan setiap mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Medan Area. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,Sc
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr Novita Wulandari, S.ST,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Dr. Adam, M.AP selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dan pelaksanaan proposal skirpsi.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB,M.AB selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

dapat terselesaikan.

6. Ibu Fitri Suciati Lubis, S.sos, MSP selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu bapak Suhardin Gaurifa dan ibu Itaria Duha yang telahmemberikan dukungan baik doa, moral maupun moril.
8. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritikkan ataupun saran dari para pembaca yang bersifat membangun demi pentingnya penyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membaca skripsi ini, dan dapat menambah wawasan terutama didunia pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

Medan, 18 Agustus 2022

RIKA ELSIA GAURIFA

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

LEMBAR PERNYATAAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

RIWAYAT HIDUP iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR BAGAN xii

DAFTAR TABEL xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran 6

2.1.1 Pengertian Peran 6

2.1.2 Jenis Jenis Peran 13

2.1.3 Struktur Peran 13

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

2.2 Konsep Camat 14
2.2.1 Konsep Camat 14
2.2.2 Kedudukan Camat 15
2.2.3 Tugas Camat 16
2.2.4 Fungsi Camat 16
2.3 Konsep Good Governance 17
2.3.1 Konsep Good Governance 17
2.3.2 Prinsip-Prinsip Good Governance 18
2.4 Penelitian Terdahulu 20
2.5 Kerangka Pemikiran 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 25
3.2 Sifat Penelitian 25
3.3 Lokasi Penelitian 26
3.4 Informan Penelitian 27
3.5 Teknik Pengumpulan Data 28
3.6 Metode Analisis Data 30
3.7 Defenisi Konseptual 32
3.8 Defenisi Operasional 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 34
4.1.1 Sejarah Kantor Camat Pulau-Pulau Batu 34

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Pulau-Pulau Batu 37
4.1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Kecamatan 39
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Camat Pulau-Pulau Batu 42
4.1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Setiap Unsur 42
4.1.6 Jumlah Penduduk Kecamatan Pulau-Pulau Batu 50
4.1.7 Kondisi Perekonomian 52
4.1.8 Kondisi Pendidikan 53
4.1.9 Sarana Dan Prasarana Kesehatan 54
4.1.10 Sarana Dan Prasarana Keagamaan 55
4.2 Pembahasan 55
4.2.1 Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan 55
4.2.2 Kendala Yang Di Hadapi Oleh Camat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan 63

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 66
5.2 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen Penelitian 69
Lampiran 2 : Data Informan 72
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara 73

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran 24
2. Struktur Organisasi 42

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Pendahuluan 22
2. Waktu Penelitian 27
3. Jumlah Penduduk 52
4. Kondisi Perekonomian 52
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan 53
6. Kondisi Pendidikan 54
7. Sarana dan Prasarana Keagamaan 55

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaruan di indonesia sudah meragam pengoperasian Negara dalam hal melaksanakan dan mewujudkan Negara yang dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik sehingga dapat terwujudnya tata cara pemerintahan yang baik, kemudian masyarakatsaat ini sangat menginginkan pemerintahan yang ideal, bersih serta mampu memberikan perhatian dalam hal menangulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Good Governance ialah bentuk cara pemimpin yang berguna,yang membangun, bertanggung jawab, jujur, adil, displin dan anti penyogokkan walaupun itu menurut ketatanegaraan walaupun menurut tata usaha. Good Governance memiliki prinsip-prinsip yaitu : partisipasi,tertib undang-undang, keterbukaan, tanggap,memiliki tujuan,ketelitian, serta berpotensi dan bertanggungjawab. Good Governance mempertanggungjawabkan kebijakan atau aturan terhadap masyarakat sebagai dasar tata administrasi yang hebat. Otoritas publik yang membuat dan menyusun standar keterampilan, tanggung jawab, keterusteragan, bantuan besar, sistem berbasis suara, produktivitas, kelangsungan hidup,hukum dan ketertiban serta memadai oleh seluruh wilayah setempat.

Pelaksanaan pemerintahan itu melakukan tugas dengan hebat dan bersih, kesepakatan dan nepotisme sangat berpengaruh ke masyarakat karena pemerintahan yang melakukan tata cara yang baik akan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pastisipasi ke daerah setempat sejauh mengakui metodologi administrasi

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

hebat dalam setiap pembangunan atau dengan rencana-rencana pemerintah kedepannya dalam mewujudkangood governance.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, maka dapat dijelaskan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Dalam pasal 224 bahwa wilayah tersebut didorong oleh daerah disebut oleh camat, camat di pilih oleh pejabat/pemimpin balai kota atas usul tersebut sekretaris wilayah setempat atau kota pekerja pemerintah yang berkualitas. Camat mendapat wewenang dari pejabat atau pimpinan balai kota dalam memenuhi kewajibannya.

Undang-undang resmi Republi Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang daerah dalam pasal 14 ayat (1), yakni sub-daerah adalah perangkat daerah atau provinsi, sebuah kota yang memiliki ruang kerja tertentu yang di kemudikan oleh kepala sub - lokal. Dalam hal ini kepala sub-wilayah ialah kepala atau pemimpin dalam hal menyelengarakan wilayah kerja kecamatan untuk melakukan tugasnya dalam hal memimpin. Camat memperoleh kelimpahan kewenangan pemerintah dari pejabat atau pimpinan balai kota untuk menangani beberapa kemerdekaan wilayah dan menyelesaikan tugas pemerintahan umum.

Peran pemimpin sangatlah penting untuk mewujudkan administrasi yang hebat, sebagai mana diketahui bahwa administrasi (pemerintahan atau administrasi) adalah sebuah siklus pelaksanaan kekuasaan Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan besar (administrasi besar). Bentuk governance adalah dukungan pemerintahan Negara yang kuat dan cakap,serta bagus,tanggap,efektif dn sukses. Administrasi besar menggabungkan kerangka organisasi Negara, jadi pekerjaan untuk mewujudkannya juga merupakan pekerjaan untuk bekerja pada kerangka

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

kerja otoritatif Negara pada umumnya. Maka "good governance" dapat terwujud bekerja secara positif, itu membutuhkan tanggung jawab dan penyertaan pertemuan yang umumnya hebat otoritas pemerintah dan masyarakat umum.

Kemandirian teritorial kini telah berubah statusnya menjadi daerah yang berfungsi kepala sub daerah sebagai perangkat provinsi daerah/kota. Dalam situasinya sebagai peraktikan mekanik lokal, pemerintah daerah (camat) dalam menyelesaikan kewajibannya mendapat sebutan bagian dari kekuasaan pejabat/ketua kota untuk menangani sebagian masalah kemerdekaan daerah, terutama yang menyangkut urusan bantuan publik. selain itu, otoritas public sub-lokal juga melakukan tugas pemerintahan umum yang meliputi :

- Mengkoordinasikan latihan penguatan kelompok rakyat.
- Usaha pengorganisasian penyelenggaran juga mengorganisir pelaksanaan dan penegakanperaturan koordinat penyelenggaran kegiatan pemerintah.
- Membangun penyelenggaran pemerintah kota/kelurahan juga
- Menyelesaikan manfaat daerah setempat yang berada dalam batas kewajibannya atau pemerintah kota atau kelurahan belum memiliki pilihan untuk melaksanakannya (UU No.32 Tahun 2004)

Jabatan camat adalah jabatan primer yang terletak di tingkat lokal tidak dapat di pungkiri bahwa kepala sub-lokal yaitu camat adalah cikal bakal yang paling tinggi di kecamatan. Seorang pemimpin memiliki pekerjaan penting dan sangat konklusif dalam proses pelayanan masyarakat,menciptakan interaksi yang baik serta melakukan tugas dengan sungguh-sungguh.

Kecamatan Pulau-Pulau Batu merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara, Terdiri dari 21 desa dan 1

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

kelurahan yang mempunyai penduduk sejumlah 8.915 jiwa. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan Good Governance namun dalam pelaksanaanya juga menghadapi permasalahan bahwa pelayanan yang di laksanakan belum efektif tentang pembangunan (Aryanus Sarumaha S.H). Untuk mengetahui secara detail perlu dilakukan penelitian oleh karna itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitianini adalah :

1. Bagaimana peran Camat dalam mewujudkan good governance di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Camat dalam mewujudkan good governance di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran camat dalam mewujudkan good governance di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi camat dalam mewujudkan good governance Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara?

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

1.4 Manfaat Penelitian.

Penelitian yang dihasilkan penulis diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis :

a. Penelitian ini diharapkan mampu memahami peran camat dalam mewujudkan good governance.
b. Penelitian ini berguna untuk menambah serta memperluas wawasan penulis dan sebagai bahan pertimbangan bagi camat dalam mewujudkan good governance.
c. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik yang berkaitan dengan peran camat dalam mewujudkan good governance

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Peran adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. (*http://kbbi,web.id/peran.html,peranan.id.m.wikipedia.org*).

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran merupakan salah satu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan juga pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dimasyarakat. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan aktifitas yang berhubungan dengan tugas atau fungsi seseorang dalam melakukan hak dan kewajiban serta sesuatu yang menjadi bagian dalam status kelompok masyarakat tertentu. Peran juga merupakan tingkah laku atau penampilan dari seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu.

Penulis mengambil teori peran dari Soerjono Soekanto (2002:243) yang dimana peran meliputi norma-norma yaitu :

1. Cara (usage)

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

Cara (usage) adalah : petunjuk dalam melakukan sesuatu apa yang ditulis atau diperintahkan.

2. Kebiasaan (folkways)

   Kebiasaan (folkways) adalah : perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk hal yang sama merupakan bukti bahwa seseorang menyukai perbuatan tersebut

3. Tata Kelakuan (mores)

   Tata Kelakuan (mores) adalah: mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas,secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya.

David Berry (2003:105) mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan oleh individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan yangdi maksud ialah imbangan dari norma-norma sosial di dalam masyarakat. Dalam peranan terdapat dua harapan yaitu : harapan yang di punyai oleh sang pemegang kedudukan terhadap masyarakat ataupun terhadap orang yang melaksanakan peranannya dan kewajibannya. Dari pendapat David Berry tersebut bisa di simpulkan peranan merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang melalui kewajiban dari jabatan ataupun pekerjaannya.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peram disebut “role” yang didefinisinya adalah “person`s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat, tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Peran menurut Soekanto (2009.212-213) adalah: proses dinamis kedudukan (status) dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawab. Soekanto (1990:268) mengemukakan suatu peranan yang mencangkup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat merupakan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

dari penjelasan di atas tentang peranan dan kedudukan saling berkaitan dan tidak dapat di pisahkan artinya dalam kedudukan terdapat peran yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan yang seseorang atau kelompok miliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

Menurut Thoha (1993:80) peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Sedangkan Siagian (1997:3) menyatakan tentang pengertian peranan adalah tempat tertentu yang di tentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Pemimpin harus selalu menciptakan adanya partisipasi bawahan, oleh karena itu pemimpin harus pandai membimbing, memotivasi, menggerakan bawahannya sehingga dapat mengetahui dan merasakan bahwa dirinya turut bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan sebab berhasil tidaknya organisasi tergantung dari bagaimana peranan itu dijalankan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

dimana pemimpin sebagai pengambilan keputusan sekaligus juga pemimpin dan bawahan pelaksana kegiatan seperti :

1. Peranan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

   Pengambilan keputusan merupakan proses memilih diantara alternatif- alternatif tindakan untuk mengatasi sebuah masalah.

2. Peranan pimpinan dalam membangun tim.

   Peran pimpinan dalam membangun tim merupakan proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas sekelompok anggotanya.

Kemudian sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

a. konsepsi peran, yaitu : kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan sesuatu situasi tertentu.
b. Harapan peran, yaitu : harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisitertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
c. Pelaksanaan peran, yaitu : perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

a. Peran adalah : pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
b. Peran adalah : pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosialtertentu.
c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

Yulk(1998:35) mengemukakan beberapa peran dalam kepemimpinan yang mencangkup

1. Peran performance pemimpin (figurehead hole) sebagai konsekuensi dari kewenangan formal mereka sebagai kepala organisasi. Para pemimpin di haruskan untuk melakukan tugas simbolis tertentu yang bersifat legal dan sosial.
2. Peran sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin bertanggungjawab agar kelompok atau organisasinya dapat bekerja sama dalam mencapai suatu tujuantertentu
3. Peran sebagai interpersonal. Dimana pemimpin harus menjaga dan mempertahankan kerja sama yang baik dan selalu berperilaku jujur terhadap kelompok atau organisasi.
4. Peran sebagai pemantau, Pemimpin harus mencari informasi untuk menyelesaikan setiap masalah.
5. Peran sebagai informasional. Pemimpin mempunyai akses khusus untuk mengetahui informasi yang tidak tersedia bagi para bawahannya
6. Peran sebagai pengambil keputusan. Pemimpin diwajibkan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan suatu kebijakan dalam organisasi maupun diluar organisasi yang di pimpin.
7. Peran sebagai wirausahaan. Pemimpin harus bertindak dalam merancang perubahan yang terkendali untuk memanfaatkan peluang untuk dapat memperbaiki situasi yang ada.
8. Peran sebagai orang yang menangani kekacauan/gangguan. Pemimpin yang menagani krisis yang mendadak yang tidak dapat diabaikan jadi pemimpin harus mempergunakan peluang.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

9. Peran sebagai mengalokasikan sumber daya. Pemimpin menggunakan jabatan untuk mengalokasikan sumber daya seperti : uang, personalia, material, peralatan,, fasilitas, dan jasa.
10. Peran sebagai perunding. Pemimpin harus ikut serta dalam perundingan untuk membuat komitmen tersebut.

Dalam hal peran kemimpinan ada beberapa yang perlu di perhatikan agar dapatmempengaruhi masyarakat yang efektif yaitu :

1. Pemimpin harus berlaku adil,jujur, terhadap masyarakat tanpa ada yang di beda-bedakan
2. Menjadi pedoman dalam suatu tindakan
3. Berperilaku bijaksana terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaaran
4. Pemimpin harus bekerja sama serta melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan.
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta memiliki kemampuan
6. Pemimpin harus selalu menghargai masyarakat.

Peran Pemimpin adalah orang yang paling tepat untuk menciptakan hubungan yang baik didalam suatu organisasi. Pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam hal mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sementara itu peranan menurut Horoepoetri, arimbi, dan santosa (2003:45) mengatakan beberapa di mensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai kebijakan. Dalam paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai suatu strategi. Menyatakan bahwa peran adalah strategi untuk

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Kemudian pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa pada keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

3. Peran sebagai alat komunikasi. Yang dimaksud adalah sebagai instrument alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Maka dari itu persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah itu dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai dan baik, guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Maksud peran ini didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan merendam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang yang nelandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
5. Peran sebagai terapi. Peran ini dilakukan sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis dari masyarakat seperti perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), kemudian tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka itu bukan komponen penting di dalam masyarakat. (Isra Hayati, 2021 : 6-7).

Dari semua penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah tindakan atau perilaku dari seseorang yang memiliki tanggung jawab dan semua itu harus diterapkan di lingkungannya agar tercapainya tujuan dan kemajuan bersama.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

Apabila peran itu diterapkan hanya untuk diri sendiri maka dalam hal itu hanya untuk kepentingannya pribadi, tetapi jika peranan tersebut dijalankan dan diterapkan di dalam organisasi maka semua itu harus berdasar untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Jenis-Jenis Peran.

Adapun pembangian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitusebagai berikut :

1. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya
2. Peran partisipatif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itusendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangananggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatutindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2.1.3 Struktur Peran.

secara umum, struktur peran ini dapat di kelompokkan menjadi 2 bagian, diantaranya sebgai berikut :

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

1. Peran Formal

   Peran formal ini merupakan suatu peran yang sangat jelas yaitu segala perilaku yang sifatnya itu homogen. Contohnya seperti dalam keluarga,suami/ayah dan istr/ibu mempunyai peran sebagai provider (penyedia),pengatur rumah tangga, merawat anak,rekreasi, serta lain-lain.

2. Peran Informal

   peran informal ini merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang memiliki sifat implicit (emosional) serta umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.2 Konsep Camat

2.2.1 Konsep Camat.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan. Camat yang di pilih oleh bupati/wali kota bertugas untuk memimpin suatu kecamatan dan memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap permasalahan yang ada di kecamatan tersebut. Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walu kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyangkut pengertian kependudukan, tugas dan fungsi kecamatan pada pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di kecamatan.
2. Camat yang dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya yang berada di bawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

Menurut Utomo (2004), pelimpahan wewenang dari bupati/walikota kepada camat merupakan suatu keharusan untuk menciptakan efektifitas dan efesien penyelenggaraan pemerintahaan sekaligus meningkatkan kualitaspelayanan umum di daerah.

2.2.2 Kedudukan Camat.

Secara tegas kedudukan camat selaku perangkat daerah yaitu:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota.
2. Camat di angkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam Negeri.
3. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
4. Pembentukan kecamatan di tetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pedoman mengenai organisasi kecamatan ditetapkan oleh menteri dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan Aparatur Negara.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

2.2.3 Tugas Camat.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan perundang - undangan. Dalam melaksanakan kewenangan atau tugas yang di berikan maka yang perlu di perhatikan oleh Bupati/Walikota yaitu :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal
2. Terwujudnya pelayanan umum yang terbaik, murah dan cepat.
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat.
4. Terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan.dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya tugas camat maka dapat diwujudkan tata cara pemerintahan yang baik di kecamatan serta dapat memperhatikan aspirasi dan potensi yang berkembang masyarakat.

2.2.4 Fungsi Camat.

Camat memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana di uraikan dalam UUD No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan.
2. Penyelenggaraan pemerintahan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, keagamaan, dan kependudukan
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

7. Pembinaan kelurahan.
8. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksanaan teknis dinas kabupaten/kota.
10. Penyelenggaraankegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
11. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

2.3 Konsep Good Governance.

2.3.1 Konsep Good Governance.

Istilah good governance (tata pemerintahan yang baik) adalah : suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah lokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratife menjalankan displin, jujur, dan adil dalam anggaran serta menciptakan motivasi bagi masyarakat. Dalam governance mengandung makna yaitu bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang di hadapi masyarakat.

Good governance merupakan kebijakan, aturan yang jujur, adil serta menjalankan suatu peran kepemimpinan dengan baik, dapat memberikan pedoman, motivasi dalam suatu pemerintahan. Contoh dari good governance adalah pemerintahan pemerintahan yang akuntabel yaitu pemerintahan yang

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan yang di berikannya terhadap masyarakat.

Menurut Kaufman, Kraay dan Mastruzi (2004:180) Good Governance adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan public dan program di rumuskan,di laksanakan, dan di evaluasi. Sedangkan Menurut Basri (2007:46) Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa public.

Pemimpin yang baik dalam menjalankan tugas kepemimpinan di sebuah birokrasi publik idealnya harus memerlukan visi dan misi. Dalam mewujudkan good governance dalam suatu pembangunan masyarakat harus perlu kerja sama yang baik dari pemimpin dengan masyarakat. Pemimpin dapat memberi dorongan berupa motivasi pada masyarakat oleh karna itu good governance dapat terwujud dengan adanya pemimpin yang juju,adil,dapat mengambil keputusan yang tepat dalam setiap masalah atau kendala yang dihadapi.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Good Governance.

Prinsip-prinsip good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut :

1. Participation (partisipasi) merupakan perilaku yang di berikan kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan atau keputusan dalam menetapan suatu tujuan tertentu. Masyarakat mempunyai suara dalam memberikan keputusan baik secara langsung maupun melalui inter-media. Partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

2. Rule of law (kerangka/aturan hukum). Aturan hukum ini dilaksanakan secara adil tanpa perbedaan terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparency (trasparansi) di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. proses-proses,lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat di terima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang di dapatkan haru dapat dipahami serta dapat di mengerti.
4. Responsiveness (responsivitas) : lembaga-lembaga publik dan proses-proses harus cepat dan tanggap dalam melayani pemangku kepentingan.
5. Consensus orientation (orientasi consensus) good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Equity (keadilan) suatu masyarakat baik lak-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan untu meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efficiency and effectiveness (efesien dan efektifitas) merupakan proses- proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah di gariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Accountability (akuntabilitas) : para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada buplik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan atas setiap aktifitas yang dilakukan.
9. Strategic vision (visi strategis) merupakan suatu penyelenggaraan dan masyarakat harus memiliki visi yang bisa mencapai kedepannya lebih baik.

Dalam uraian di atas tentang prinsip-prinsip good governance perlu kita ketahui bahwa good governance bertujuan yang lebih baik seperti camat dalam mewujudkan good governance pemerintah harus berperan menyelenggarakan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

kegiatan kecamatan serta camat harus membina dan mengawasi pemerintahan di kecamatan agar dapat terwujudnya good governance.

Penerapan Good Governance memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Oleh karna itu tentunya dalam mewujudkan good governance di kecamatan maka terdapat permasalahan atau kendala untuk itu penulis termotivasi untuk mengangkat tema penelitian sebagai berikut : " Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan"

2.4 Penelitian Terdahulu.

Dalam penelitian ini terdapat banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian- penelitian tersebut berkaitan dengan peran camat dalam mewujudkan good governance. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muna warah (2019)	Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan public di kantor camat Bandar dua kabupaten pidie jaya	- Prinsip partisipasi di kantor camat dua menurut hasil penelitian yang di dapatkan telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan, masyarakat mengikuti proses pelayanan yang teratur serta penerapan prinsip aturan hukum yang adadi kantor camat Bandar dua

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

			telahberjalan dengan baik. - hambatan yang dimiliki di kantor camat Bandar dua adalah SDM (sumberdaya manusia yang masih kurang).
2	Andi nurhana (2018)	Peranan camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dikecamatan burau.	- peranan camat burau dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan untuk mewujudkan good governance di lakukan dengan baik dan efektif. - peranan camat burau membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan di tingkat desa, dan puskesmas untuk mewujudkan good governance dilakukan dengan baik dan efektif. - peranan camat burau mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

			penyelenggaraan pemerintahan desa, dan puskesmas untuk mewujudkan good governance dilaksanakan dengan baik dan efektif.
3	Satria fahrudin syah (2018)	Efektivitas pelayanan administrasi masyarakat desa dan kelurahan (PADMA) Dalam mewujudkan good governance didesa sambirejo kecamatan plupuh kebupaten sragen.	- pelayanan administrasi masyarakat desa sambirejo dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 indikator efektifitas antara lain:pencapaian tujuan,integritas, dan adaptasi. - kendala pelaksanaan pelayanan administrasi masyarakat desa dan keluraha (PADMA) di desa sambirejo yaitu : faktor sarana dan prasarana, faktor sumber daya manusia, faktor teknologi dan informasi serta kesadaran dari masyarakat.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

2.5 Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir yang akan membantu penulis untuk mengembangkan suatu kajian untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitiandilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka yang berkaitan dengan teori agar dapat menjawab masalah masalah yang ada didalam rumusan masalah pada penelitian.

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian,penulis mengambil teori peran dari Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003:45) dalam teori ini berpendapat bahwa peran sangat di tentukan dalam isi teorinya yang diantaranya : peran sebagai kebijakan, strategi, dan sebagai alat komunikasi.

peranan menurut Horoepoetri, arimbi, dan santosa (2003:45) mengatakan beberapa di mensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai kebijakan. Dalam paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai suatu strategi. Menyatakan bahwa peran adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Kemudian pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa pada keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Yang dimaksud adalah sebagai instrument alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Maka dari itu persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah itu dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai dan baik, guna mewujudkan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

keputusan yang responsive dan responsible.

Kerangka pemikiran yang di gambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

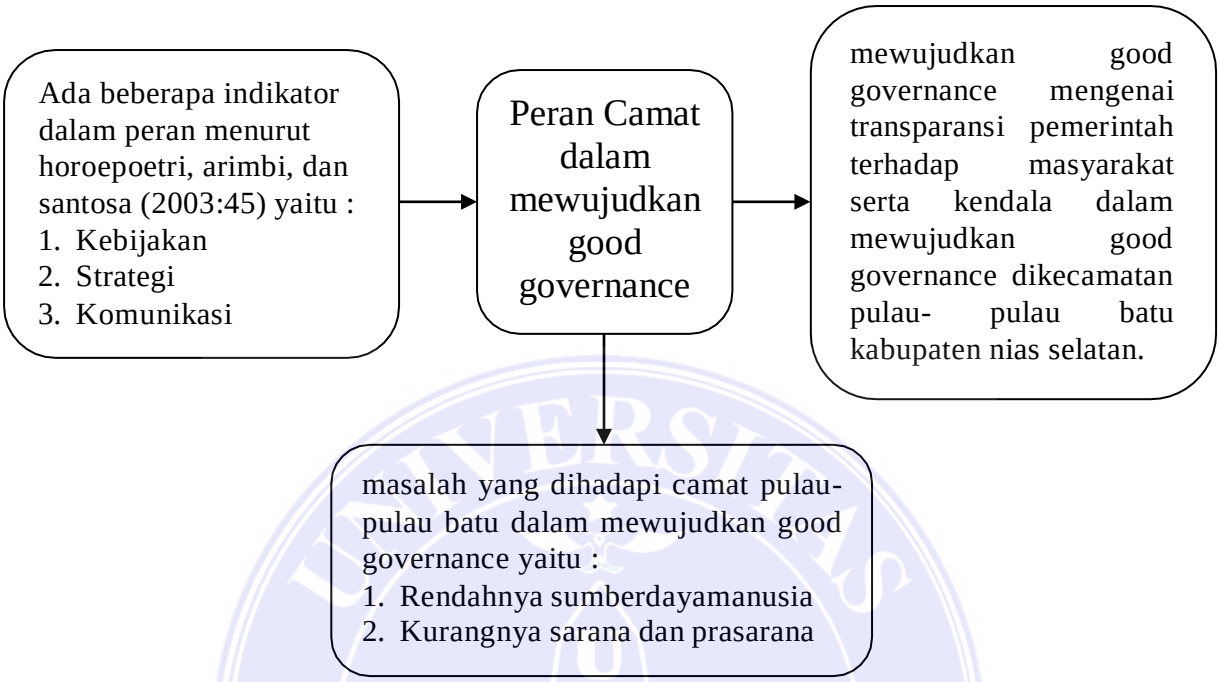

Bagan 1. Kerangka pemikiran

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam metode penelitian ini adalah : penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisas. Setelah data di peroleh, kemudian di jelaskan dengan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berupa mendiskripsikan atau mengungkapkan karakterlistik berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang di teliti secara alamiah dan apa adanya. Penulis akan melakukan penelitian dalam hal pengamatan dari fenomena yang terjadi di kecamatan Pulau-Pulau Batu kabupaten Nias Selatan pada Peran Camat Dalam Mewujudkan Good Governance.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:13). Metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk mengambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif membahas tentang permasalahan dalam suatu masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi atau keadaan tertentu termasuk dalam hubungan, kegiatan,sikap pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dalam suatu fenomena atau kejadian. Dalam menjalankan tata cara pemerintahan yang baik khususnya dalam peran camat mewujudkan good governance maka diperlukan kebijakan atas suatu masalah yang menjadi solusi didalam masyarakat dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat membantu masyarakat dalam setiap masalah tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk dapat mencari solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian deskriptif ini juga mengambarkan dan menganalisis terutama pada sistem kerja khususnya peran camat dalam mewujudkan good governance di kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang akan dibutuhkan Penulis akan melaksanakan penelitian pada kantor camat Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Penelitian akan terlaksana pada bulan Desember 2021-Januari 2022.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari senin-jumat pada jam 08.00-12.00 dan jam 14.00-16.00. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agt 2022
1	Penyusunan Proposal											
2	Seminar											

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

	Proposal											
3	Perbaikan Proposal											
4	Pengambilan Data/Penelitian											
5	Penyusunan Skripsi											
6	Seminar Hasil											
7	Perbaikan Skripsi											
8	Sidang Meja Hijau											

3.4 Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian serta suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Informan Kunci

   Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat Pulau-Pulau Batu Bapak Kornelius Wau S.Sos.

2. Informan Utama.

   Menurut Afrizal (2016:139) informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Sekcam Bapak Insafi Wau,

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

A.Ma Pd dan staff kantor Camat Pulau-Pulau Batu Bapak Yerianus Duha Khususnya dalam pelayanan masyarakat.

3. Informan Tambahan.

   Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Aryanus sarumaha S.H dan Yerni Manao sebagai masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu khususnya yang pernah mengurus sesuatu di kantor Camat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Sugiyono (2018:224) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari observasi,wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian yang dimana dapat di kumpulkan secara alamiah dan apa adanya. Pengumpulan data dilakukan semata merupakan strategi dalam suatu penelitian agar dapat memperoleh datadata yang di perlukan selama penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber. Dalam pengumpulan data ini digunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Perlu diketahui bahwa sumber primer yang dihasilkan dalam pengumpulan data yang langsung diberikan kepada pengumpulan data sedangkan sumber sekunder yang tidak langsung di berikan kepada pengumpulan data misalnya bisa didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Dalam teknik pengumpulan data dapat di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

1. Observasi

   Observasi merupakan suatu proses pengamatan langsung dalam suatu obyek yang ada di lingkungan atau dilapangan untuk mengamati berbagai fenomena sosial yang berkembang serta mencari informasi tentang permasalahan atau kendala dalam suatu lingkungan yang di teliti agar dapat mengetahui bagaimana peran camat dalam mewujudkan good governance di kecamatan pulau-pulau batu kabupaten nias selatan.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan suatu Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan informan. Pewawancara yang memberikan pertanyaan agar dapat mengetahui informasi, keterangan, data yang sesuai dengan tujuan penelitian seperti memberikan pertanyaan tentang bagaimana peran camat dalam mewujudkan good governance serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan good governance di kecamatan pulau-pulau batu kabupaten nias selatan, Yang di wawancarai adalah :

   - Kornelius Wau S.Sos Selaku Camat
   - Insafi Wau, A.Ma Pd Selaku Sekcam
   - Yerianus Duha Selaku Staff Subbag Umum Kepegawaian
   - Aryanus Saruman S.H Selaku Masyarakat
   - Yernni Manao Selaku Masyarakat

3. Dokumentasi

   Dalam suatu penelitian sangat penting yang namanya dokumentasi untuk melengkapi data data atau informasi yang di perlukan dalam suatu penelitian. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

informasi dalam bentuk buku,dokumen,arsip,tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6 Metode Analisis Data.

Analisis data adalah : suatu yang menganalisis tentang permasalahan yang ada pada tempat penlitian atau menganalisis serta mencari informasi. Dalam penelitian sangatlah penting yang namanya analisis data karena merupakan suatu bagian proses analisis data untuk menghasilkan kesimpulan dalam mengambil keputusan. Analisis data juga diperlukan agar peneliti mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang sedang terjadi dalampenelitian.

Analisis data merupakan suatu proses hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mencari kesimpulan yang penting dalam penelitian dan dapat di pahami serta dipelajari oleh diri sendiri maupun orang lain..

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif :

1. Pengumpulan data.

   Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana mencari informasi yang jelas dari informan dengan melakukan observasi,wawancara, dan dokumentasi. Data yang di perlukan adalah berupa pernyataan dari camat dalam hal mewujudkan good governance dikecamatan pulau-pulau batu kabupaten Nias Selatan.

2. Reduksi data.

   Reduksi data dilakukan selama proses pengumpulan data yang masih berlangsung. Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang di hasilkan dalam penelitian di lapangan. Reduksi data ini dilakukan dalam penelitian

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

untuk mengambil data data atau informasi yang masuk dari hasil observasi,wawancara dan dokumentasi selama penelitian agar dapat di satukan dan di simpulkan menjadi data yang bermakna dan dapat di pelajari.

Reduksi data yang di dapatkan dari hasil penelitian akan di pilih sesuai dengan tujuan yaitu : bagaimana peran camat dalam mewujudkan good governance dan untuk mengetahui kendala atau masalah apa saja yang di hadapi oleh camat dalam mewujudkan good governance di kecamatan pulau-pulau batu kabupaten nias selatan.

3. Penyajian data.

   Penyajian data merupakan kumpulan data atau informasi yang di dapatkan penulis selama penelitian berlangsung dilapangan. Penyajian data ini membantu penulis dalam memberikan pemahaman tentang masalah atau kendala yang di dapatkan dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Dalam penelitian ini sangat penting dilakukan penyajian data agar dapat mempermudah penulis dalam tujuan menganalisis peran camat dalam mewujudkan good governance dikecamatan pulau-pulau batu di kabupaten Nias Selatan.

4. Kesimpulan data.

   Kesimpulan data di lakukan dalam peneliltian setelah dilakukan penyajian data. Kesimpulan data merupakan pengambilan keputusan sementara yang pada awalnya belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di vertifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang di dapatkan dari penelitian tentang peran camat dalam mewujudkan goog governance di kecamatan pulau-pulau batu kabupaten Nias Selatan agar dapat memperoleh kesimpulan dari jawaban

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

masalah yang di angkat dalampenelitian tersebut.

3.7 Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik suatu masalah yang akan di teliti. Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan defenisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut :

1. Peran, adalah tingkah laku atau perilaku yang diharapkan agar seseorang yang memiliki status dan fungsi tertentu untuk mempengaruhi suatu keadaan dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya agar dapat dikatakan memenuhi peran. Dalam hal ini yang di maksud menjalankan peran adalah camat dikecamatan pulau-pulau batu.
2. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan. Camat yang di pilih oleh bupati/wali kota bertugas untuk memimpin suatu kecamatan dan memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap permasalahan yang ada di kecamatan tersebut. Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walu kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Dalam hal ini peran Camat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebagai pihak yang berkewajiban.
3. good governance (tata pemerintahan yang baik) adalah : suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah lokasi

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratife menjalankan displin, jujur, dan adil dalam anggaran serta menciptakan motivasi bagi masyarakat. Dalam governance mengandung makna yaitu bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang di hadapi masyarakat.

3.8 Defenisi Operasional

Konsep operasional merupakan unsur yang mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa sebagai pendukung untuk menganalisis variabel tersebut :

peranan menurut Horoepoetri, arimbi, dan santosa (2003:45) mengatakan beberapa di mensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai kebijakan. Dalam paham ini berpendapat bahwa peran merupakansuatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa pada keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi, yakni sebagai instrumen alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah itu dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai dan baik, guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah di teliti oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa :

1. Peran Camat dalam mewujudkan good governance di kecamatan pulau -pulau batu kabupaten nias selatan, dengan menggunakan indikator menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003:45), yang terdiri dari indikator kebijakan,strategi, dan komunikasi bahwa peran Camat dalam mewujudkan Good Governance di Kecamatan Pulau-Pulau batu Kabupaten Nias Selatan masih belum berjalan dengan efektif Dalam hal transparan. Hal ini dilihat dari tiga indikator yangdigunakan antara lain kebijakan, strategi, komunikasi.
2. Faktor masalah yang di temui oleh camat dalam mewujudkan good governance di kecamatan pulau-pulau batu kabupaten nias selatan yaitu rendahnya sumber dayamanusia dan kurangnya sarana dan prasarana.

Saran.

Saran yang diberikan antara lain sebagai berikut :

a. Camat harus lebih berperan aktif dalam setiap sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan dan masyarakat harus bekerjasama agar dapat terwujudnya good governance di kecamatan pulau-pulau batu kabupaten nias selatan.
b. Kantor camat agar secepatnya melakukan penambahan jumlah pegawai serta fasilitas pelayanan terhadap masyarakat agar bisa menjadi lebih efektif dan sesuai yang di harapkan

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

DAFTAR PUSTAKA

Amir.akbar, (2014). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Andi Nurhana, (2018). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Burau. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara).

Afrizal (2016:139), Tentang Informan Penelitian.

Algi Firmansah, (2018). Pelaksanaan Good Governance Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. (skripsi program studi administrasi publik).

Anissa Rossae, (2019). Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. (Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan).

Biddle dan Thomas (2002:244), Tentang Teori Peran

Basri (2007:46),Tentang Pengertian Good Governance

David Berry (2003:105),Defenisi Tentang Peranan.

Deska Zulkarnain1 Mitrayanti2, (2020). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. (Jurnal Ilmu Administrasi Publik).

Desmayani Desmayani, (2019). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance`) Di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. (Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan)

Eka Robert Chandra A, (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. (Jurnal Ilmu Pemerintahan).

Thoha (1993:80) Pengertian Tentang Peran.

Iman Amanda Permatasari,(2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. (Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah).

Ismayanti, (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

Kabupaten Enrekang. (Skripsi Peogram Studi Ilmu Administrasi Negara).

Kaufman,kraay dan mastruzi (2004 :180) Tentang Pengertian Good Governance

Muna Warah, (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. (Skripsi Ilmu AdministrasiNegara).

Niswatun Nafiah,(2019). Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan. (Skripsi Program Studi Ilmu Politik).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Sutarto (2009:138;139), Pengertian Tentang Peran

Sugiyono (2018), Tentang Metode penelitian.

Sugiyono (2014:13), Tentang Jenis Penelitian.

Sugiyono (2018:224), Tentang Teknik Pengumpulan Data.

Sri Hartati, (2019). Peran Serta Camat Sebagai Pejabat Pemerintah Di Kecamatan Guna Melayani Kepentingan Masyarakat Secara Efektif Dan Efesien Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik http://jurnal. untagsmg.ac.id/ index.php/

Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif.

Satria Fahrudin Syah, (2018). Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PADMA) Dalam Perwujudan Good Governnace Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum).

Soerjono Soekanto (2002:243) Tentang Teori Peran.

Soekanto (2009:212-213) Pengertian Tentang Peran

Siagian (1997:3) Pengertian Tentang Peran.

Soekanto (2001:242), Tentang Jenis-Jenis Peran.

Undang-Undang No. 32 Tahun (2004), Tentang Pemerintah Daerah

Utomo (2004), Tentang Pengertian Camat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yulk (1998:35), Mengemukakan Peran Dalam Kepemimpinan

Document Accepted 26/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen Penelitian

Kantor Camat Di Kecamatan Pulau-Pulau BatuKabupaten Nias Selatan.

Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan kunci yaitu Bapak Kornelius Wau S.Sos, Camat Pulau-Pulau Batu,Kabupaten Nias Selatan.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Insafi Wau, A.Ma Pd, Sekcam di Kecamatan Pulau-Pulau Batu,Kabupaten Nias Selatan.

Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Yerianus Duha, Subbag Umum Kepegawaian di KecamatanPulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

Dokumen peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Bapak Aryanus Sarumaha S.H, Masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.

Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu ibu yerni manaomasyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.

Document Accepted 26/9/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

Lampiran 2 : Data Informan

1. Informan Kunci

   Nama : Kornelius Wau S.Sos

   Jenis Kelamin : Laki-Laki

   Usia : 38 Tahun

   Jabatan : Camat Pulau-Pulau Batu

2. Informan utama

   Nama : Insafi Wau, A.Ma Pd

   Jenis Kelamin : Laki-Laki

   Usia : 55 Tahun

   Jabatan : Sekcam

3. Informan utama

   Nama : Yerianus Duha

   Jenis Kelamin : Laki-Laki

   Usia : 46 Tahun

   Jabatan : Subbag Umum Kepegawaian

4. Informan Tambahan

   Nama : Aryanus Sarumaha S.H

   Jenis Kelamin : Laki-Laki

   Usia : 30 Tahun

   Status : Masyarakat Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/9/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

5. Informan Tambahan

   Nama : Yerni Manao

   Jenis Kelamin : Perempuan

   Usia : 37 Tahun

   Status : Masyarakat Di Kecamatan Pulau-Pulau

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Yang akan di wawancarai serta pertanyaan yang akan di ajukan peneliti kepada informan sebagai berikut:

a. Pertanyaan yang akan di ajukan kepada Camat serta sekcam di kantor CamatPulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan yaitu :
   1. Apa yang bapak ketahui tentang Good Governance?
   2. Bagaimana penerapan pelaksanaan Good Governance Di Kecamatan Pulau-PulauBatu?
   3. Apa saja prinsip-prinsip Good Governance yang telah berhasil di terapkan diKecamatan Pulau-Pulau Batu?
   4. Bagaimana peran bapak sebagai pemimpin di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dalam halmewujudkan Good Governance?
   5. Apa saja faktor pendukung dalam mewujudkan Good Governance di KecamatanPulau-Pulau Batu?
   6. Apa saja kendala atau masalah yang bapak hadapi dalam mewujudkan GoodGovernance?
   7. Bagaimana respon atau keterlibatan masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/9/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

Batudalam mewujudkan Good Governance?

8. Apakah pegawai kantor camat Pulau-Pulau Batu sudah melaksanakan tugasnyadengan baik?
9. Apakah pelayanan dalam masyarakat sudah efektif atau belum?
10. Bagaimana bapak mewujudkan Good Governance khususnya dalam pelayanan yangefektif di Kecamatan Pulau-Pulau Batu?

b. Pertanyaan yang akan di ajukan kepada Staff kantor camat Pulau-Pulau BatuKabupaten Nias Selatan.

1. Apakah Bapak/ibu memberikan kemudahan dalam melayani proses pelayanan diKecamatan Pulau-Pulau Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dalam pelayanan public di Kecamatan Pulau-PulauBatu?
3. Apa saja kendala atau masalah yang dapat menghambat pelayanan yang efektif?
4. Menurut Bapak/ibu bagaimana bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan public?
5. Menurut Bapak/ibu, Apakah ada sosialisasi yang di lakukan di kantor camatpulau-pulau batu untuk pelaksanaan pelayanan public?
6. Menurut Bapak/ibu apakah pelayanan yang di berikan kepada masyarakat sudahefektif atau belum?
7. Apakah Bapak/Ibu mampu menjalankan prosedur dan mekanisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
8. Apakah Bapak/Ibu displin,jujur,adil dalam memberikan pelayanan di kantorcamat pulau-pulau batu?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/9/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

9. Apakah pegawai kantor camat pulau-pulau batu mampu menjalankan visi-misi?
10. Apakah Bapak/ibu memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat ?

c. Pertanyaan yang akan di ajukan kepada Masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau BatuKabupaten Nias Selatan.

1. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip dasar dalam Good Governance?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan yang di berikan oleh pegawai di kantorcamat pulau-pulau batu?
3. Bagaimana peran camat dalam mewujudkan Good Governance di kecamatan pulau-pulau batu?
4. Apa saja yang bapak/ibu ketahui langkah-langkah yang dilakukan oleh camat dalam hal mewujudkan Good Governance di kecamatan pulau-pulau batu?
5. Apakah bapak/ibu diberi pelayanan secara adil di kantor camat pulau-pulau batu?
6. Pelayanan yang bagaimanakah yang diharapkan oleh masyarakat di kecamatanpulau-pulau batu?
7. Apakah pelayanan yang di berikan sudah efektif atau belum?
8. Apa saja saran yang di berikan dalam terwujudkan Good Governance di kecamatanpulau-pulau batu?
9. Apakah ada solusi atau saran dari masyarakat agar pelayanan di kantor camat dapatmenjadi lebih baik lagi kedepannya?
10. Apakah dalam pelayanan public di kantor camat pulau-pulau batu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

pernah terjadikelalaian atau kesalahan?

11. Menurut bapak/ibu pegawai kantor camat bertanggung jawab atas kelalaian ataukesalahan yang dilakukan dalam pelayanan public?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22